

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Rahadi (2014), menemukan hasil bahwa pada ukuran dewan direksi secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba, ukuran dewan komisaris secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, kualitas audit berdampak signifikan pada nilai DA (manajemen laba), transparansi komite audit berdampak signifikan pada nilai DA (manajemen laba).

Yustiningarti (2017), membuktikan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba, ketika asimetri informasi terjadi, pemegang saham tidak memiliki sumber daya yang cukup atau akses atas informasi yang relevan untuk memonitor tindakan manajer, dimana hal ini akan memberikan kesempatan bagi manajer untuk melakukan manajemen laba. Mekanisme *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Tidak efektifnya GCG dalam mengurangi manajemen laba dikarenakan karakteristik sampel perusahaan menunjukkan dimana sebagian sampel perusahaan menunjukkan adanya hubungan keluarga antara pemegang saham, direksi, komisaris dan manajemen, sehingga fungsi pengawasan kurang maksimal. Kompensasi bonus berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba, Perusahaan dengan rencana bonus lebih menyukai metode akuntansi yang meningkatkan laba suatu periode sehingga manajer akan mendapatkan bonus pada periode tersebut.

Rahadyan dan Purwanto (2015), Berdasarkan hasil yang diperoleh bahwa *surplus free cash flow* yang ada di perusahaan sangat menentukan praktik manajemen laba yang ada di perusahaan. Sementara itu dari mekanisme *good corporate governance* hanya ukuran dewan komisaris yang mempengaruhi praktik manajemen laba di perusahaan, sementara komposisi dewan komisaris independen, ukuran komite audit, frekuensi rapat komite audit, dan jumlah *finance experts* komite audit tidak berpengaruh terhadap besarnya manajemen laba di perusahaan.

Santoso (2017) Hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance* yang diwakili proxy kepemilikan institusional memiliki pengaruh tidak langsung yang signifikan terhadap nilai perusahaan dengan menggunakan kinerja keuangan sebagai variabel intervening.

Dewi dan Putra (2016) menyimpulkan hasil analisis bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif pada integritas laporan keuangan, kepemilikan manajemen berpengaruh positif pada integritas laporan keuangan, komisaris independen berpengaruh positif pada integritas laporan keuangan, komite audit tidak berpengaruh positif pada integritas laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013.

Alzoubi (2016) menunjukkan hasil penelitiannya bahwa lima aspek struktur kepemilikan adalah efektif sebagai pengawas manajemen, yang mengarah ke manajemen laba yang lebih rendah dan FRQ lebih tinggi. Penelitian ini berkontribusi pada literatur dengan menyimpulkan bahwa salah satu cara di mana struktur kepemilikan memainkan peran dengan mempengaruhi manajemen laba dan meningkatkan FRQ.

Sanchia dan Zen (2015) menyimpulkan bahwa tidak ada dampak yang signifikan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik terdiri dari Indeks Persepsi Tata Kelola Perusahaan (CGPI): *Self-assessment*, dokumen, kertas dan pengamatan terhadap kinerja perusahaan yang diukur oleh EVA.

Luthan et al., (2015) hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa komposisi dewan komisaris independen, komposisi komite audit dan kualitas audit sebagai variabel independen, sebelum dan sesudah konvergensi PSAK IFRS berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. sedangkan lainnya: kepemilikan manajerial berpengaruh positif tidak signifikan sebelum konvergensi PSAK IFRS dan efek negatif setelah konvergensi IFRS PSAK tetapi tidak signifikan terhadap manajemen laba. kepemilikan institusional sebelum konvergensi PSAK IFRS berpengaruh negatif, sedangkan setelah konvergensi PSAK IFRS berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap manajemen laba.

Tabel 2.1

Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Kesimpulan
Hana Pricila Rahadi (2014)	Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap praktik Manajemen Laba di Bursa Efek Indonesia	Ukuran Dewan Direksi, Ukuran Dewan Komisaris, Kualitas Auditor, Transparansi Komite Audit, Manajemen laba	Ukuran dewan direksi secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba, Ukuran dewan komisaris secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, Kualitas audit dan Transparansi Komite Audit berdampak signifikan pada nilai DA (Manajemen Laba).
Norma Dwi Yustiningarti (2017)	Pengaruh Asimetri Informasi, Mekanisme Corporate Governance dan Kompensasi Bonus Terhadap Manajemen Laba	Asimetri Informasi, Mekanisme Corporate Governance, Kompensasi Bonus, Manajemen Laba	Asimetri informasi berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba, Mekanisme <i>corporate governance</i> tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, Kompensasi bonus berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba.
S. Willy Rahadyan W., Agus Purwanto (2015)	Pengaruh Surplus Free Cash Flow dan Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Manajemen Laba	Manajemen Laba Surplus Free Cash Flow, Dewan komisiaris Independen, Komite Audit, Frekuensi rapat komite audit,	<i>surplus free cash flow</i> yang ada di perusahaan sangat menentukan praktik manajemen laba perusahaan. mekanisme <i>good corporate governance</i> hanya ukuran dewan komisaris yang memperngaruhi

		Jumlah <i>finance expert</i> komite audit	praktik manajemen laba diperusahaan, sementara komposisi dewan komisaris independen, ukuran komite audit, frekuensi rapat komite audit, dan jumlah <i>finance experts</i> komite audit tidak berpengaruh terhadap besarnya manajemen laba di perusahaan.
Agus Santoso (2017)	Pengaruh Good Corporate Governance terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai variable intervening	Kepemilikan institusional, nilai perusahaan dan kinerja keuangan	Good Corporate Governance yang diwakili proxy kepemilikan institusional memiliki pengaruh tidak langsung yang signifikan terhadap nilai perusahaan dengan menggunakan kinerja keuangan sebagai variabel intervening.
Ni Kadek Harum Sari Dewi dan I Made Pande Dwiana Putra (2016)	Pengaruh Mekanisme Corporate Governance pada Integritas Laporan Keuangan	Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen, Komite Audit, dan Integritas Laporan Keuangan	kepemilikan institusional berpengaruh positif pada integritas laporan keuangan, kepemilikan manajemen berpengaruh positif pada integritas laporan keuangan, komisaris independen berpengaruh positif pada integritas laporan keuangan, komite audit tidak berpengaruh positif pada integritas laporan keuangan.
Ebraheem Saleem Salem Alzoubi	Ownership structure and earnings	Ownership structure and	Struktur kepemilikan adalah efektif sebagai pengawas manajemen,

(2016)	management: evidence from Jordan	earnings management	yang mengarah ke manajemen laba yang lebih rendah dan FRQ lebih tinggi. Penelitian ini berkontribusi pada literatur dengan menyimpulkan bahwa salah satu cara di mana struktur kepemilikan memainkan peran dengan mempengaruhi manajemen laba dan meningkatkan FRQ.
Maria Inez Sanchia dan Tuntun Salamantun Zen, SE.,M.Si.,Ak (2015)	Impact of Good Corporate Governance in Corporate Performance	Economic Value Added and Corporate Governance Perception Index	Berdasarkan analisis dan uji hipotesis, bisa jadi menyimpulkan bahwa tidak ada dampak yang signifikan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik terdiri dari Indeks Persepsi Tata Kelola Perusahaan (CGPI): Self-assessment, dokumen, kertas dan pengamatan terhadap kinerja perusahaan yang diukur oleh EVA.
Elvira Luthan, Ileh Satria & Ilmainir (2015)	The Effect of Good Corporate Governance Mechanism to Earnings Management Before and After IFRS Convergence	Good Corporate Governance Mechanism and Earnings Management	Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa komposisi dewan komisaris independen, komposisi komite audit dan kualitas audit sebagai variabel independen, sebelum dan sesudah konvergensi PSAK IFRS berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. sedangkan lainnya: kepemilikan manajerial berpengaruh

			positif tidak signifikan sebelum konvergensi PSAK IFRS dan efek negatif setelah konvergensi IFRS PSAK tetapi tidak signifikan terhadap manajemen laba. kepemilikan institusional sebelum konvergensi PSAK IFRS berpengaruh negatif, sedangkan setelah konvergensi PSAK IFRS berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap manajemen laba.
--	--	--	--

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Keagenan

Teori keagenan (*agency theory*) diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976 dan teori ini merupakan dasar untuk memahami tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Menurut Hidayati (2015) bahwa hubungan keagenan terjadi ketika perbedaan kepentingan antara pemegang saham *principal* dan manajemen *agent*, serta hubungan kontraktual antara pihak yang mendelegasikan pengambilan keputusan tertentu dengan pihak yang menerima pendelegasian tersebut. Dalam hubungan kontraktual tersebut pihak *principal* memiliki wewenang sebagai pemilik sekaligus investor untuk mendelegasikan tugas kepada *agent* untuk bertindak sesuai keinginan *principal* dalam mengelola perusahaan. Masalah keagenan muncul karena adanya oportunistik dari *agent* yaitu perilaku manajemen untuk memaksimalkan kesejahteraan sendiri yang berlawanan dengan kepentingan *principal*. Manajer memiliki dorongan untuk memilih dan menerapkan metode akuntansi yang dapat memperlihatkan reaksi pasarnya yang baik untuk tujuan mendapat *bonus principal*.

Eisenhardt dalam Agustia (2013:24-42) menggunakan tiga asumsi sifat dasar manusia guna menjelaskan tentang teori agensi yaitu (1) manusia pada

umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Tiga hal tersebut yang menimbulkan sifat oportunistik yang kemudian akan menimbulkan konflik keagenan.

Dalam teori keagenan (*agency theory*), hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) memperkerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent tersebut. Hubungan antara *principal* dan *agent* dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi (*asymmetrical information*) karena *agent* berada pada posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan *principal*. Dengan asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka dengan informasi asimetri yang dimilikinya akan mendorong *agent* untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui *principal*. Konflik kepentingan dan asimetri informasi yang muncul dapat dikurangi dengan mekanisme pengawasan yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan berbagai pihak di perusahaan. Mekanisme pengawasan yang dimaksud dalam teori agensi dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme *corporate governance*.

Corporate governance diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. Penerapan *corporate governance* juga dapat memberikan kepercayaan terhadap kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan pemilik (pemegang saham), sehingga dapat meminimalkan konflik kepentingan dan biaya keagenan (*agency cost*). *Good corporate governance* menghasilkan berbagai mekanisme yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa tindakan manajemen sudah selaras dengan kepentingan pemegang saham (Susiana dan Herawaty, 2007).

Secara keseluruhan, masalah biaya keagenan dan biaya dari tindakan yang dilakukan untuk meminimalkan masalah keagenan disebut sebagai biaya keagenan (*agency costs*). Biaya ini sering kali diidentifikasi dengan manfaat langsung

yang diterima oleh agen serta nilai sekarang (*present value*) yang negatif. Biaya keagenan ditemukan ketika terdapat perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan manajer, atasan dengan bawahan, antar manajer dari departemen, atau kantor cabang yang saling bersaing.

Positive Accounting Theory (PAT)

Hery (2017:105) mengutarakan bahwa teori akuntansi positif memiliki ciri pemecahan masalah (*problem solving*) yang disesuaikan dengan realitas praktek akuntansi. Pendekatan yang digunakan dalam teori akuntansi positif adalah pendekatan ekonomi dan perilaku. Tujuan dari teori akuntansi positif adalah untuk menjelaskan dan memprediksi praktek akuntansi. Praktek akuntansi muncul sejalan dengan pertumbuhan aktivitas bisnis. Teori akuntansi positif menyediakan seperangkat prinsip atau konsep yang luas untuk menjelaskan, yang berarti memberi jawaban terhadap praktek akuntansi yang berlaku dan memprediksi fenomena yang terjadi. Teori akuntansi positif berupaya menjelaskan sebuah proses, yang menggunkan kemampuan, pemahaman, dan pengetahuan akuntansi serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu di masa mendatang.

Watts dan Zimmerman (1986) berpendapat bahwa terdapat tiga hipotesis dalam teori akuntansi positif (*positive accounting theory*) yang dapat memotivasi manajer melakukan manajemen laba. Hipotesis-hipotesis tersebut adalah: “*bonus plan hypothesis* (hipotesis program bonus), *debt covenant hypothesis* (hipotesis perjanjian hutang), dan *political cost hypothesis* (hipotesis biaya politik).” Hubungan antara *positive accounting theory* dengan penelitian ini adalah hipotesis-hipotesis dalam teori akuntansi positif yang dapat digunakan untuk pemilihan keputusan manajemen untuk menggunakan prinsip Konservatisme Akuntansi.

2.2.2. Good Corporate Governance

2.2.2.1. Pengertian Good Corporate Governance

Menurut IICG (*The Indonesian Institute for Corporate Governance*) *good corporate governance* dapat didefinisikan sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organisasi perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai

tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *Stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.

Effendi (2009) dalam bukunya *The Power of Good Corporate Governance*, pengertian GCG adalah suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang.

Dari pendapat pakar diatas dapat dikatakan bahwa *good corporate governance* (GCG) adalah seperangkat peraturan yang mengatur, mengelola dan mengawasi hubungan antara para pengelola perusahaan dengan stakeholders disuatu perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan yang melakukan peningkatan pada kualitas GCG menunjukkan peningkatan penilaian pasar, sedangkan perusahaan yang mengalami penurunan kualitas GCG, cenderung menunjukkan penurunan pada penilaian pasar (Cheung, 2011).

Corporate Governance adalah salah satu mekanisme yang dapat memberi pengaruh pada pihak manajemen dalam menerapkan prinsip akuntansi yang terkait dengan prinsip konservatisme akuntansi (Fala,2007). Pengguna laporan keuangan perlu memahami kemungkinan bahwa perubahan laba akuntansi selain dipengaruhi oleh kinerja manajer juga dapat dipengaruhi oleh kebijakan konservatisme akuntansi yang dipilih oleh manajer (Lo,2005 dalam Dewi dan Suryanawa, 2014). Konsep corporate governance berkaitan erat dengan kepercayaan baik pada perusahaan yang melaksanakannya maupun pada iklim usaha di suatu Negara.

Konsep GCG belakangan ini makin mendapat perhatian masyarakat dikarenakan GCG memperjelas dan mempertegas mekanisme hubungan antar para pemangku kepentingan di dalam suatu organisasi yang mencakup:

- a. Hak-hak para pemegang saham (shareholders) dan perlindungannya.
- b. Peran para karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) lainnya.
- c. Pengungkapan (*disclosure*) yang akurat dan tepat waktu.

- d. Transparansi terkait dengan struktur dana operasi perusahaan.
- e. Tanggung jawab dewan komisaris dan direksi terhadap perusahaan itu sendiri, para pemegang saham, dan pihak lain yang berkepentingan.

Good Corporate Governance (GCG) merupakan prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberi pertanggung jawaban kepada para *shareholder* khususnya dan *stakeholders* pada umumnya. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur kewenangan direktur, manajer, pemegang saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu. Apabila mekanisme *good corporate governance* tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka seluruh proses aktivitas perusahaan akan berjalan dengan baik, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan baik yang sifatnya kinerja finansial maupun non finansial akan juga turut membaik.

2.2.2.2. Prinsip Good Corporate Governance

Menurut Sutedi (2012:10) kesadaran pentingnya pengelolaan perusahaan yang baik itu sangat diharapkan terdapat di dalam setiap perusahaan. Kesadaran ini di perlukan agar informasi yang dikeluarkan setiap perusahaan dapat dipercaya kebenarannya.

Adapun beberapa prinsip tersebut, yaitu :

1. *Transparency* (Keterbukaan)

Perusahaan harus memiliki informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada *stakeholders*. Perusahaan harus meningkatkan kualitas, kuantitas, dan frekuensi dari pelaporan keuangan, ini semua untuk mengurangi kegiatan curang seperti manipulasi laporan (*creative accounting*) atau manajemen laba (*earnings management*), pengakuan pajak yang salah, dan penerapan dari prinsip-prinsip pelaporan yang cacat.

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Setiap hal yang dilakukan oleh perusahaan itu harus di laporkan atau harus diketahui oleh *stakeholders*, itu semua adalah bentuk pertanggungjawaban dari perusahaan kepada *stakeholders*. Apalagi, bila dalam perusahaan

tersebut terjadi kesalahan seperti integritas manajemen yang rendah, etika bisnis yang buruk, dan aturan kekuatan dari pada aturan hukum.

3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangannya yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

4. *Independency* (Kemandirian)

Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. *Fairness* (Kewajaran)

Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.2.3. Mekanisme Good corporate governance

Mekanisme merupakan cara kerja sesuatu secara tersistem untuk memenuhi persyaratan tertentu. Mekanisme *corporate governance* merupakan suatu prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan control atau pengawasan terhadap keputusan. Menurut Iskandar & Chamlou (2000) dalam Lastanti (2004), mekanisme dalam pengawasan *corporate governance* dibagi dalam dua kelompok yaitu *internal* dan *external mechanisms*.

Menurut Mas Achmad Daniri (2005:8), *Internal mechanisms* adalah cara untuk menegendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham (RUPS), Direksi serta Dewan Komisari guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya. Sedangkan *external mechanisms* adalah cara mempengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal, seperti pengendalian oleh perusahaan dan pengendalian pasar.

Mekanisme *corporate governance* dalam penelitian ini meliputi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit dan komisaris independen. Masing-masing mekanisme tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008). Organisasi memiliki kemampuan untuk bertahan apabila terdapat pemisahan antara pemilik dan pengendalinya. Struktur kepemilikan saham dalam suatu perusahaan dapat terdiri atas kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi dan kepemilikan saham oleh manajerial. Institusi sebagai pemilik saham dianggap lebih mampu dalam mendeteksi kesalahan yang terjadi. Hal ini dikarenakan investor institusi lebih berpengalaman dibandingkan dengan investor individual. Dengan demikian akan semakin membatasi pihak manajemen dalam memainkan angka-angka dalam laporan keuangan (Sriwedari, 2009). Adanya monitoring yang efektif oleh pihak institusional menyebabkan penggunaan utang menjadi menurun. Hal ini karena peranan utang sebagai salah satu alat monitoring sudah diambil alih oleh kepemilikan institusional. Tindakan monitoring oleh pihak investor institusional dapat mengurangi perilaku *opportunistic* atau mementingkan diri sendiri yang dilakukan oleh manajer sehingga manajer dapat lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan (Oktadella dan Zulaikha, 2011). Monitoring tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka semakin besar pula kekuatan suara dan dorongan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan. Kepemilikan institusional memiliki kelebihan yaitu memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi serta memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.

2. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan persentase saham yang dimiliki oleh manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan yang meliputi komisaris dan direksi. Kepemilikan manajemen merupakan salah satu mekanisme yang dipergunakan agar pengelola melakukan aktivitas sesuai kepentingan pemilik perusahaan. Kepemilikan manajerial dimaksudkan untuk memberi kesempatan manajer terlibat dalam kepemilikan saham, sehingga kedudukan manajer sejajar dengan pemilik perusahaan (Oktadella dan Zulaikha, 2010). Kepemilikan manajerial merupakan salah satu isu penting dalam teori keagenan sejak dipublikasikan oleh Jensen dan Meckling (1976:315) dalam Sriwedari (2009), yang menyatakan bahwa dengan semakin besarnya proporsi kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan maka manajemen akan berupaya lebih giat untuk memenuhi kepentingan pemegang saham yang juga adalah dirinya sendiri. Sedangkan menurut Widarjo *et al.*, (2010) kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus pemilik atau pemegang saham perusahaan. Manajer yang memiliki saham dalam perusahaan akan berusaha meningkatkan kinerja perusahaan, karena dengan meningkatnya laba perusahaan maka insentif yang diterima oleh manajer akan meningkat pula. Sebaliknya apabila kepemilikan manajer turun, maka biaya keagenannya akan meningkat. Hal ini dikarenakan manajer akan melakukan tindakan yang tidak memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, manajer akan cenderung memanfaatkan sumber-sumber perusahaan untuk kepentingan sendiri. Semakin besar proporsi kepemilikan manajerial pada perusahaan, maka manajemen cenderung giat untuk kepentingan pemegang saham yang tidak lain dirinya sendiri. Kepemilikan perusahaan juga terkait dengan pengendalian operasional perusahaan. Dengan semakin besarnya kepemilikan manajer, maka manajer dapat lebih leluasa dalam mengatur pemilihan metode akuntansi, serta kebijakan-kebijakan akuntansi penting terkait dengan masa depan perusahaan (Oktadella dan Zulaikha, 2010).

3. Ukuran Komite Audit

Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen (KNKG, 2006). Peraturan mengenai komite audit dikeluarkan oleh Bapepam pada Mei 2000, melalui SE/03/PM/2000, Keputusan Ketua Bapepam Kep-29/PM/2004, Peraturan Bapepam-LK No. IX 1.5, Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/2012. Berdasarkan peraturan ini dijelaskan bahwa komite audit harus memiliki sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, seorang diantaranya merupakan komisaris independen yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit, sedang anggota lainnya merupakan pihak ekstern yang independen dimana sekurang-kurangnya satu diantaranya memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan atau keuangan. Tujuan pembentukan komite audit adalah memastikan laporan keuangan yang dikeluarkan tidak menyesatkan dan sesuai dengan praktik akuntansi yang berlaku umum, memastikan bahwa internal kontrol perusahaan memadai, menindaklanjuti dugaan adanya penyimpangan yang material di bidang keuangan dan implikasi hukumnya, dan merekomendasikan seleksi auditor eksternalnya (Jama'an, 2008).

4. Komisaris Independen

Di dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (*Task Force* Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*). Kehadiran komisaris independen dalam dewan dapat menambah kualitas aktivitas pengawasan dalam perusahaan, karena mereka tidak terafiliasi dengan perusahaan sebagai pegawai (Andarini dan Januarti, 2010). Komisaris

independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait. Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan berfungsi untuk mengawasi dan melindungi pihak-pihak diluar manajemen perusahaan, menjadi penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen, sehingga komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance* dan menghasilkan laporan keuangan yang berintegritas tinggi (Susiana dan Herawaty, 2007).

2.2.3. Manajemen laba

2.2.3.1. Pengertian Manajemen Laba

Menurut Schipper dalam Gumanti (2001:62), pengertian manajemen laba yaitu pengungkapan manajemen dengan cara melakukan intervensi pada proses pelaporan kepada pihak eksternal perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Menurut Subramanyam dan Wild (2010:131) manajemen laba merupakan hasil dari kebebasan dalam aplikasi akuntansi akrual yang mungkin terjadi.

Sulistyanto (2008:48) menjelaskan bahwa manajemen laba merupakan upaya manajer perusahaan untuk mempengaruhi informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Manajemen laba merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan dan menambah bias dalam laporan keuangan, serta dapat mengganggu para pemakai laporan keuangan dalam mempercayai angka-angka dalam laporan keuangan tersebut (Setiawati dan Na'im 2001).

Scott (2000) dalam Fatayatiningrum dan Prabowo (2010:10) membagi cara pemahaman atas manajemen laba menjadi dua. Pertama, melihatnya sebagai perilaku oportunistik manajer untuk memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang dan *political cost (opportunistic Earnings Management)*. Kedua, dengan memandang manajemen laba dari

perspektif *efficient contracting (Efficient Earnings Management)*, dimana manajemen laba memberi manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi suatu kejadian yang tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak.

2.2.4.2. Motivasi Manajemen Laba

Terdapat beberapa motivasi yang mendorong manajer untuk melakukan manajemen laba yang dikemukakan Scott (2003:411) dalam Lukman (2013), yaitu:

1. Motivasi bonus (*bonus motivation*), manajer yang memiliki informasi atas laba bersih perusahaan akan bertindak secara *oportunistik* untuk melakukan manajemen laba dengan memaksimalkan laba saat ini.
2. Kontrak jangka panjang (*Debt covenant*), semakin dekat perusahaan dengan perjanjian kredit, maka manajer akan cenderung memilih prosedur yang dapat memindahkan laba periode mendatang ke periode berjalan. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan kreditur atas tindakan-tindakan yang dilakukan manajer perusahaan.
3. Motivasi politik (*political motivation*), manajemen laba digunakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan pada perusahaan publik. Jadi perusahaan cenderung mengurangi laba yang dilaporkan karena adanya tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah menetapkan peraturan yang lebih ketat.
4. Motivasi pajak (*taxion motivation*), motivasi penghematan pajak menjadi salah satu motivasi yang nyata. Karena berbagai metode akuntansi digunakan dengan tujuan penghematan pajak penghasilan.
5. Perubahan *chief executive officer (CEO)*, adanya pergantian CEO yang mendekati masa pensiun akan cenderung menaikkan pendapatan untuk meningkatkan bonus mereka. Apabila kinerja perusahaan buruk, mereka akan memaksimalkan pendapatan agar tidak diberhentikan.
6. *Initial Public Offering (IPO)*, perusahaan yang akan *go public* belum memiliki nilai pasar, sehingga mendorong manajer perusahaan yang akan *go public* melakukan manajemen laba dalam propectus mereka dengan harapan dapat menaikkan harga saham perusahaan.

7. Mengkomunikasikan informasi pada investor, hal tersebut dapat meningkatkan informasi pelaporan keuangan, sehingga investor tetap menilai bahwa perusahaan tersebut dalam kinerja yang baik. Jika laporan laba diatur agar mewakili manajemen dalam mengestimasi kekuatan laba secara terus menerus, dan pasar dapat mewujudkannya maka harga saham secara cepat akan mencerminkan informasi tersebut.

2.2.4.3. Pola Manajemen Laba

Menurut Sri Sulistyanto(2008:177) manajemen terbagi ke dalam 3 pola, berupa peningkatan laba, penurunan laba dan perataan laba :

1. *Income increasing* (peningkatan laba) : upaya perusahaan mengatur agar laba periode berjalan menjadi lebih tinggi daripada laba sesungguhnya. Upaya ini dilakukan untuk mempermainkan pendapatan periode berjalan menjadi lebih tinggi daripada pendapatan sesungguhnya dan atau biaya periode berjalan menjadi lebih rendah dari biaya sesungguhnya.
2. *Income decreasing* (penurunan laba) : upaya perusahaan mengatur agar laba periode berjalan menjadi lebih rendah daripada labanya sesungguhnya. Upaya ini dilakukan dengan mempermainkan pendapatan periode berjalan menjadi lebih rendah daripada pendapatan sesungguhnya dan atau biaya periode berjalan menjadi lebih tinggi dari biaya sesungguhnya.
3. *Income smoothing* (perataan laba) : upaya perusahaan mengatur agar labanya relatif sama selama beberapa periode. Upaya ini dilakukan dengan mempermainkan pendapatan dan biaya periode berjalan menjadi lebih tinggi atau lebih rendah daripada pendapatan atau biaya yang sesungguhnya.

2.2.4.4. Teknik Manajemen Laba

Indah dan Ekawati (2005) teknik manajemen laba dapat dilakukan dengan tiga teknik, yaitu :

1. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi
Cara manajemen mempengaruhi laba adalah melalui *judgement* (perkiraan) terhadap estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi biaya garansi, amortisasi aktiva tak berwujud, dan lain-lain.

2. Mengubah metode akuntansi

Perubahan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi, contoh : mengubah metode depresiasi aktiva tetap, dari metode depresiasi angka tahun ke metode depresiasi garis lurus.

3. Menggeser periode biaya atau pendapatan

Contoh rekayasa periode biaya atau pendapatan antara lain: mempercepat atau menunda pendapatan sampai periode akuntansi berikutnya, mempercepat atau menunda pengeluaran promosi sampai periode akuntansi berikutnya, menunda atau mempercepat pengiriman produk ke pelanggan, mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tak terpakai.

2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1. Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap Manajemen Laba

Mekanisme *good corporate governance* dalam penelitian ini meliputi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, dan komisaris independen.

2.3.1.1. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba

Kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan *investment banking* (Siregar dan Utama dalam Guna dan Herawaty, 2010:53). Kepemilikan institusional dianggap memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pihak manajemen untuk melakukan tugasnya dengan baik.

Indriastuti (2012) menemukan bahwa variabel kepemilikan institusional secara statistik berpengaruh negatif terhadap manajemen laba di dalam perusahaan. Tingkat kepemilikan institusional yang besar akan menimbulkan fungsi pengawasan yang lebih ketat, sehingga dapat mencegah perilaku *opportunistic* manajer yang nantinya akan berdampak pada peningkatan kinerja operasional serta meminimalisir praktik manajemen laba secara efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Suryani (2010) menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba, artinya semakin besar kepemilikan institusional maka semakin kecil praktik manajemen laba yang dilakukan perusahaan.

Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah :

H₁ : Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

2.3.1.2. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Manajemen Laba

Dari sudut pandang teori akuntansi, manajemen laba sangat ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan. Motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda, seperti antara manajer yang juga sekaligus sebagai pemegang saham dan manajer yang tidak sebagai pemegang saham. Dua hal tersebut akan mempengaruhi manajemen laba, sebab kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang mereka kelola. Secara umum dapat dikatakan bahwa persentase tertentu kepemilikan saham oleh pihak manajemen cenderung mempengaruhi tindakan manajemen laba (Gideon, 2005).

Jensen & Meckling (1976) dalam (Rininta, 2008) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Semakin besar kepemilikan manajemen dalam suatu perusahaan maka manajemen akan berupaya lebih giat untuk memenuhi kepentingan pemegang saham yang juga adalah dirinya sendiri. Tingginya kepemilikan manajerial maka keinginan untuk melakukan manajemen laba akan berkurang karena manajer ikut menanggung baik dan buruknya akibat dari setiap keputusan yang diambil. Dengan demikian semakin meningkat kepemilikan manajerial maka tindakan manajer untuk melakukan manajemen laba akan menurun.

Penelitian Warfield, Wild (1995) dalam Boediono (2005) kepemilikan manajerial memiliki hubungan negatif dengan manajemen laba. Hasil penelitian ini mendukung bukti bahwa kepemilikan manajerial mengurangi dorongan oportunistik manajer sehingga akan mengurangi manajemen laba. Jadi semakin

besar jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen maka semakin kecil kecenderungan manajer untuk melakukan manajemen laba.

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah :

H₂ : Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

2.3.1.3. Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Manajemen Laba

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan dan peningkatan efektivitas audit internal dan eksternal. Komite audit bertugas melakukan pengawasan untuk meningkatkan efektivitas dalam menciptakan keterbukaan dan pelaporan keuangan yang berkualitas, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pengawasan internal yang memadai (Sulistyanto, 2008).

Penelitian yang dilakukan Palestin (2006) dan Wilopo (2004) bahwa ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Komite audit meningkatkan pengawasan terhadap pelaporan keuangan yang dilakukan oleh manajer. Komite audit akan menghambat keleluasaan manajemen dalam memanipulasi laporan keuangan sehingga praktik manajemen laba dapat ditekan. Sehingga semakin tinggi ukuran komite audit maka semakin rendah kemungkinan manajer dalam melakukan manajemen laba.

Penelitian yang dilakukan Wedari (2004) membuktikan bahwa terdapat hubungan negatif antara ukuran komite audit dengan manajemen laba. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin banyaknya anggota komite audit maka dapat meningkatkan kinerja komite audit tersebut sehingga semakin kecil manajemen laba yang terjadi.

Dalam penelitian yang dilakukan Iskandar dan Rahmat (2007) bahwa ukuran komite audit berpengaruh negatif pada manajemen laba. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan jumlah anggota komite audit yang lebih besar, maka praktik manajemen laba di suatu perusahaan akan semakin kecil. Klein (2002) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki komite audit akan menghambat perilaku manajemen laba oleh pihak manajemen. Siregar dan Utama (2008)

menyatakan terdapatnya hubungan negatif antara manajemen laba dengan adanya komite audit.

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H₃ : Ukuran Komite Audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

2.3.1.4. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (KNKG,2004).

Pengaruh dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi monitoring dari implementasi kebijakan direksi. Peran komisaris ini diharapkan akan meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham. Oleh karena itu, dewan komisaris seharusnya dapat mengawasi kinerja direksi yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

Berdasarkan peraturan Bapepam, jumlah minimal komisaris independen berjumlah 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris. Jumlah komisaris independen yang proporsional dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajemen sehingga dapat membatasi manajemen laba. Subhan (2011) menyatakan bahwa semakin tinggi komposisi dewan komisaris independen maka akan menurunkan manajemen laba.

Penelitian Rahnamay dan Nabavi (2010) serta Djatu (2013) menunjukkan komposisi dewan komisaris pengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen dapat meningkatkan praktek *corporate governance* dan dapat membantu dalam menekan adanya manajemen laba dalam perusahaan. Chtourou, *et al.* (2001) menunjukkan bahwa semakin besar proporsi dewan komisaris independen maka semakin kecil terjadinya manajemen laba, dengan kata lain semakin independen dewan komisaris, akan semakin mengurangi kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan.

Utami dan Rahmawati (2008) juga meneliti bahwa pengaruh komposisi dewan komisaris independen terhadap manajemen laba, dan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya pengaruh negatif antara komposisi dewan komisaris independen dengan manajemen laba.

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H₄ : Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

2.4. Kerangka Konseptual Penelitian

Terjadinya banyak kasus manipulasi terhadap *earnings* yang sering dilakukan oleh manajemen membuat perusahaan melakukan mekanisme pengawasan atau monitoring untuk meminimalkan praktik manajemen laba. Dengan mekanisme *good corporate governance* yaitu (kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit dan komisaris independen) diduga mampu mempengaruhi dalam menekan manajemen laba. Oleh karena itu diadakan penelitian lebih lanjut untuk menguji apakah mekanisme *good corporate governance* tersebut berpengaruh terhadap manajemen laba.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya serta pengembangan hipotesis, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual Penelitian

